BAB III
MONOGRAFI KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat adalah sebuah daerah administratif di Provinsi Sumatera Barat yang didirikan secara sah melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 via proses pemekaran dari Kabupaten Pasaman. Secara geografis, area ini mempunyai luas wilayah mencapai 3.887,77 km dengan populasi yang senantiasa meningkat, yang mana pada 2015 terdaftar sejumlah 410.307 jiwa. Dari sisi administrasi, Kabupaten Pasaman Barat mempunyai letak yang menguntungkan lantaran bersinggungan langsung di sisi Utara dengan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara suatu daerah tetangga yang mempunyai sifat kependudukan yang lebih lapang dan padat.

Secara geografis, Kabupaten Pasaman Barat merupakan suatu daerah administratif di Provinsi Sumatera Barat yang berposisi pada titik 00°33' Lintang Utara sampai 00°11' Lintang Selatan serta 99°10' hingga 100°04' Bujur Timur (BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024). Menjadi kawasan tepi laut barat Pulau Sumatera, Kabupaten Pasaman Barat mempunyai lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara di bagian utara dan Samudra Hindia di sebelah barat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebelah Timur**:**Berbatasan dengan Kabupaten Pasaman (kabupaten induk), Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Barat**:** Berbatasan langsung dengan Perairan Samudera

Hindia.

Batas wilayah tersebut menempatkan Kabupaten Pasaman Barat sebagai wilayah koridor ekonomi lintas provinsi yang menghubungkan Jalur Barat Sumatera Barat dengan wilayah Sumatera Utara, sekaligus memiliki potensi maritim dan agraris yang signifikan.

Pusat pemerintahan dan roda eksekutif Kabupaten Pasaman Barat berpusat di Simpang Ampek (Simpang Empat), yang sekaligus mengemban peran sebagai ibu kota kabupaten. Sesuai dengan toponiminya, Simpang Ampek ditandai oleh keberadaan empat persimpangan utama di pusat kota yang menjadikannya sebagai jalur transit krusial bagi mobilitas antardaerah. Posisi geografis yang bernilai strategis ini memicu perkembangan akseleratif Simpang Ampek, tidak hanya sebagai pusat birokrasi, melainkan juga sebagai episentrum perdagangan, jasa, dan komersial.

Akselerasi pembangunan di ibu kota ini diindikasikan oleh ketersediaan infrastruktur publik yang representatif, di antaranya:

1. Fasilitas perkantoran pemerintahan;
2. Sektor penunjang kesehatan (2 unit Rumah Sakit);
3. Sektor pendidikan tinggi (2 Perguruan Tinggi Swasta); serta
4. Aksesibilitas transportasi udara melalui Bandar Udara Pusako Anak Nagari yang berjarak 7 kilometer dari pusat kota.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selain potensi komersial, Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki keunggulan kompetitif di sektor pariwisata yang mencakup destinasi wisata alam, cagar budaya, maupun wahana rekreasi buatan. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Pasaman Barat secara kultural bertindak sebagai ruang ketiga atau wilayah persinggungan antarbudaya. Geografi perbatasan ini memicu interaksi intensif dan berkelanjutan antara entitas budaya yang berbeda, hingga membentuk proses percampuran budaya (akulturasi atau sinkretisme budaya) yang khas.

Secara historis dan sosiologis, Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah rantau bersama bagi dua Etnis dominan, yaitu etnis Minangkabau dan Etnis Mandailing. Heterogenitas ini melahirkan struktur sosial yang unik. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, masyarakat Pasaman Barat secara umum mengadopsi dan mengacu pada sistem adat-istiadat serta Tradisi Minangkabau. Kendati demikian, penetrasi dan pengaruh Tradisi Mandailing tetap terefleksi secara signifikan dalam berbagai ritus sosial.

Fenomena hibriditas budaya ini paling eksplisit terlihat dalam tata cara upacara perkawinan masyarakat setempat. Secara struktural, prosesi perkawinan masih mempertahankan pilar-pilar utama Adat Minangkabau, seperti:

1. Tradisi meminang (*marapiak*/*maminang*);
2. Penggunaan pakaian adat Minangkabau; dan
3. Ketaatan pada sistem kekerabatan matrilineal (mengikuti garis keturunan ibu).

Namun, pada tataran praktis dan instrumentalnya, tradisi tersebut tidak lagi diimplementasikan secara murni sebagaimana Adat Minangkabau *darek* (luak nan tigo). Terdapat modifikasi, akomodasi, dan adaptasi unsur-unsur Budaya Mandailing di dalamnya. Realitas sosio-kultural inilah yang menjadikan Kabupaten Pasaman Barat sebagai lokus penelitian yang kaya akan nilai-nilai pluralisme, negosiasi identitas, dan harmonisasi interetnis.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 1



Geografi dan iklim

Kabupaten Pasaman Barat secara astronomis terletak antara 0º 33’ Lintang Utara sampai 0º 11’ Lintang Selatan dan antara 99º10’ - 100º 04’ Bujur Timur dan dilalui oleh garis equator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai luas wilayah sekitar 3.887,77 Km2 dan memiliki luas lautan seluas 800,47 Km2. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan yaitu:

1. Sungai Beremas
2. Ranah Batahan,
3. Koto Balingka
4. Sungai Aur
5. Lembah Melintang
6. Gunung Tuleh
7. Talamau
8. Pasaman
9. Luhak Nan Duo
10. Sasak Ranah Pasisie
11. Kinali.

Kecamatan Pasaman memiliki wilayah terluas yaitu 508,93

UIN IMAM BONJOL PADANG

Km2 atau sekitar 13,09 persen dari luas Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie memiliki luas daerah terkecil yakni 123,71 (3,18 persen). Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki 6 pulau yang terdapat di Kecamatan Sungai Beremas.

3.2. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat

3.2.1 Kondisi Geografis Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

3.2.1.1 Letak Astronomis dan Batas Wilayah

Secara makro, wilayah Kabupaten Pasaman Barat terletak pada koordinat astronomis antara 0º 33' Lintang Utara sampai 0º 11' Lintang Selatan serta antara 99º10' - 100º 04' Lengkap Timur. Berdasarkan posisinya, wilayah ini dilalui langsung oleh garis khatulistiwa (0^0), yang secara natural memberikan karakteristik iklim tropis basah dengan curah hujan yang cukup tinggi serta tingkat kesuburan tanah yang optimal bagi sektor agraris.

Sebagai pusat administrasi kabupaten, Kecamatan Pasaman dikelilingi oleh batas-batas wilayah administrasi kecamatan tetangga dalam cakupan Kabupaten Pasaman Barat, yang meliputi Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Kinali, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Ranah Batahan, hingga Kecamatan Sungai Beremas.

3.2.1.2 Luas Wilayah dan Pembagian Administratif

Kecamatan Pasaman memiliki signifikansi spasial yang sangat besar, di mana area ini tercatat sebagai kecamatan dengan luas daratan terbesar di

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kabupaten Pasaman Barat. Dari total luas yurisdiksi kabupaten yang mencapai 3.887,77 Km^2 (secara kartografis dibulatkan menjadi 3.888 Km^2, Kecamatan Pasaman menguasai area seluas 508,93 Km^2. Luas ini melampaui wilayah-wilayah penyangga utama lainnya seperti Kecamatan Kinali 482,04 Km^2 dan Kecamatan Sungai Beremas 440,48 Km^2.

Secara administratif, unit pemerintahan terendah di Kecamatan Pasaman terbagi atas nagari dan unit jorong yang dipantau secara berkala melalui instrumen registrasi desa dan Pendataan Potensi Desa (Podes) BPS untuk mengklasifikasikan tipologi wilayah berdasarkan topografi dataran, lereng, maupun Daerah Aliran Sungai (DAS).

Secara administratif, Kecamatan Pasaman yang memiliki luas daratan terbesar yakni 508,93 Km^2 terbagi ke dalam 7 (tujuh) Nagari hasil penataan wilayah terbaru, yaitu Nagari Lingkuang Aua, Nagari Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Nagari Lingkuang Aua Barat, Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Aua Kuniang Selatan, dan Nagari Sukamenanti Jaya. Ketujuh nagari ini membawahi puluhan jorong dengan karakteristik topografi yang variatif, mulai dari wilayah pusat perkotaan (Simpang Empat) yang padat penduduk hingga wilayah pelosok perkebunan kelapa sawit dan lereng perbukitan.Kondisi geografis yang sangat luas dan mencakup daerah pedalaman ini secara faktual memengaruhi aksesibilitas infrastruktur publik. Banyak fasilitas umum, seperti gedung sekolah dasar, balai jorong, maupun rumah warga yang kerap dijadikan

UIN IMAM BONJOL PADANG

sebagai lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), terletak di area yang berundak, memiliki anak tangga tinggi, atau memiliki akses jalan tanah yang sulit ditempuh saat musim hujan. Karakteristik geografis tingkat nagari inilah yang secara tidak langsung menciptakan batasan mobilitas fisik bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya para lansia dan penyandang disabilitas di Kecamatan Pasaman ketika harus menyalurkan hak pilihnya.

3.2.1.3 Kondisi Demografis Kecamatan Pasaman

Dinamika kependudukan di Kecamatan Pasaman dipengaruhi erat oleh posisinya sebagai pusat pertumbuhan (growth center) Kabupaten Pasaman Barat. Secara agregat, proyeksi penduduk pertengahan tahun Juni hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif di tingkat kabupaten, dimana jumlah penduduk meningkat dari 443,51 ribu jiwa pada Tahun 2023, menjadi 450,05 ribu jiwa pada Tahun 2024, dan mencapai 456,47 ribu jiwa pada Tahun 2025. Laju pertumbuhan penduduk bergerak konstan dari kisaran 1,41% pada 2023, melonjak ke angka 1,66 % pada 2024, dan berada pada level 1,49% pada 2025.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sebagai ibu kota kabupaten, Kecamatan Pasaman menyerap konsentrasi penduduk tertinggi, yang berdampak pada tingkat kepadatan penduduk per kilometer persegi yang jauh lebih padat dibanding kecamatan lain. Struktur demografi wilayah ini dicirikan oleh rasio jenis kelamin yang seimbang serta piramida penduduk ekspansif yang didominasi oleh kelompok usia produktif (15 tahun ke atas). Kelompok produktif ini

menopang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wilayah yang secara makro menyentuh angka 67,08% pada periode akhir Tahun 2025.

Tingkat kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Pasaman berkorelasi linier dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasaman Barat yang tumbuh secara konsisten dari angka 71,39 (2023), naik menjadi 72,03 (2024), hingga mencapai 72,78 pada Tahun 2025. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini didorong oleh pencapaian makro pada sektor pendidikan dengan Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas yang sangat tinggi sebesar 99,75 %, serta peningkatan derajat kesehatan yang tercermin dari Angka Harapan Hidup masyarakat yang mencapai rata-rata 72,75 tahun.

Dari aspek sosio-ekonomi, tantangan pembangunan di wilayah ini ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin tingkat kabupaten sebesar 7,00%per Maret 2025 (setara dengan 34,60 ribu jiwa) serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,34 % pada posisi Agustus 2025. Struktur perekonomian masyarakat Kecamatan Pasaman sangat bertumpu pada pemanfaatan lahan untuk sektor pertanian tanaman pangan (komoditas jagung), perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan mikro, serta sektor perdagangan dan jasa yang menjadi roda penggerak utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasaman Barat yang secara keseluruhan telah menyentuh nilai 21,12 triliun rupiah atas dasar harga berlaku.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.2.2. Struktur Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pasaman Barat

3.2.2.1 Komisi Penyelenggaraan Pemilu(KPU) Kabupaten Pasaman Barat

Lembaga penyelenggara Pemilu permanen di tingkat kabupaten. Berdasarkan dokumen Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), kantor KPU(Komisi Pemilihan Umum) Pasaman Barat sendiri berdomisili dan berkedudukan hukum di wilayah Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman. Bertanggung jawab penuh atas seluruh tahapan pemilu di Kabupaten Pasaman Barat, menetapkan jumlah surat suara (seperti SK 1008 Tahun 2024), mengangkat anggota PPK(Pejabat Pembuatan Komitmen) Pasaman, menetapkan hasil perolehan kursi DPRD(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), serta menjadi pihak Termohon apabila terjadi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.



Gambar 2
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026

3.2.2.2 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasaman

Lembaga *ad-hoc* (sementara) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat Kecamatan Pasaman. Memimpin pelaksanaan pemilu di wilayah kecamatan. Salah satu tugas vitalnya tercermin dari dokumen rekapitulasi hasil (*Model D. Hasil Kecamatan*), dimana PPK(Pejabat Pembuatan Komitmen) Pasaman bertugas menghimpun kotak suara dari seluruh TPS/Nagari di Kecamatan Pasaman dan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan. Hasil pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam sertifikat rekapitulasi tingkat kecamatan sebelum dikirim ke KPU Kabupaten.

3.2.3 Sekretariat PPK (Pejabat Pembuatan Komitmen) Kecamatan Pasaman

Struktur pendukung administrasi dan fasilitasi teknis di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) (biasanya diisi oleh ASN/Pegawai dari lingkungan Kantor Camat Pasaman). Memberikan dukungan logistik, pengelolaan anggaran operasional pemilu tingkat kecamatan, dan urusan surat-menyurat demi kelancaran tugas-tugas PPK Pasaman. Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Lembaga *ad-hoc* tingkat desa/kelurahan yang dibentuk untuk wilayah Nagari yang ada di bawah administrasi Kecamatan Pasaman (seperti Nagari Lingkuang Aua, Sukamenanti, Aua Kuniang, dll.). Mengurus validasi data pemilih (DPT) di tingkat nagari, mengumumkan hasil pemungutan suara dari TPS di wilayah nagarinya, dan membantu PPK Pasaman dalam mendistribusikan logistik pemilu ke tiap TPS.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.2.4 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Badan *ad-hoc* terkecil yang bertugas langsung di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Pasaman pada hari H pemungutan suara. Menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Pasaman juga memegang tanggung jawab inklusif untuk mendata dan memberikan fasilitas kemudahan akses bagi pemilih disabilitas (fisik, intelektual, mental, wicara, rungu, netra) saat menyalurkan hak suaranya di TPS.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Pasaman memiliki peran krusial sebagai ujung tombak pelayanan inklusif pada hari pemungutan suara. Berdasarkan total yurisdiksi yag dilayani, pada Pemilu Februari 2024 terdapat 240 TPS yang tersebar di seluruh nagari, sebelum akhirnya dirampingkan menjadi 133 hingga 157 TPS pada pelaksanaan Pilkada November 2024 akibat kebijakan penggabungan kuota pemilih maksimal per TPS.Secara teknis kelembagaan, pembagian kerja KPPS di tingkat TPS ini sangat bergantung pada kualitas akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disuplai oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun, dalam tata kelola administrasi kelembagaan di tingkat kecamatan, belum terdapat sinkronisasi data sekunder atau basis data terintegrasi (real-time database) mengenai klasifikasi jenis disabilitas (baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik) antara penyelenggara pemilu (KPU/PPK) dengan instansi sosial daerah seperti Dinas Sosial maupun pemerintahan nagari setempat. Ketiadaan pemetaan basis data yang presisi ini berimplikasi langsung pada lemahnya kesiapan teknis para petugas KPPS di lapangan dalam memproyeksikan penyediaan logistik ramah

UIN IMAM BONJOL PADANG

difabel, alat bantu visual, template braille legislatif, maupun efektivitas penugasan layanan kunjungan atau jemput bola (ballot box keliling) bagi pemilih disabilitas berat.

3.2.5 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pasaman

Lembaga pengawas *ad-hoc* tingkat kecamatan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Mengawasi setiap tahapan Pemilu yang berjalan di Kecamatan Pasaman agar tidak terjadi pelanggaran hukum pemilu. Panwascam hadir memantau jalannya rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK Pasaman untuk memastikan kesesuaian data perolehan suara partai, caleg, presiden, maupun Kepala Daerah(BPS Pasaman Barat).

3.3. Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kecamatan Pasaman Kab Pasaman

3.3.1 Struktur Penyelenggaraan dan Pembagian Daerah Pemilihan (Dapil)

Menurut struktur tata kelola Pemilu 2024, efektivitas pelaksanaan tahapan di Kecamatan Pasaman sangat bergantung pada kinerja kelembagaan tingkat ad-hoc. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasaman bertindak sebagai perpanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat dalam memimpin operasionalisasi teknis, yang dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Nagari dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Dari sisi pengawasan, Panwaslu Kecamatan Pasaman beserta Pengawas TPS menjalankan fungsi kontrol untuk meminimalkan potensi pelanggaran administrasi, politik uang, serta menjaga netralitas aparatur negara.

Ditinjau dari kontestasi politik legislatif, Kecamatan Pasaman tergabung dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Pasaman Barat 1 bersama dengan Kecamatan Talamau untuk Pemilu anggota DPRD

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai Dapil dengan alokasi kursi yang signifikan, Kecamatan Pasaman menjadi medan kontestasi paling sengit bagi para Calon legislatif (caleg) maupun Partai Politik pengusung. Selain memperebutkan kursi DPRD Kabupaten, masyarakat di Kecamatan Pasaman juga menyalurkan hak suaranya untuk empat jenis pemilihan lainnya, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Anggota DPR RI (Dapil Sumatera Barat II), Anggota DPD RI (Dapil Sumatera Barat), dan Anggota DPRD Provinsi (Dapil Sumatera Barat 4).

3.3.2 Alur Logistik, Tahapan Rekapitulasi, dan Kompleksitas Lapangan

Proses distribusi logistik Pemilu 2024 di Kecamatan Pasaman melibatkan koordinasi lintas sektor yang ketat. Pergerakan perlengkapan pemungutan suara—seperti kotak suara, surat suara, dan bilik suara—dimulai dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Pasaman Barat menuju Sekretariat PPK Pasaman, sebelum akhirnya disebarkan ke seluruh TPS dengan pengawalan ketat dari Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat dan pengawasan Panwaslu.

Pada hari pemungutan suara Tanggal 14 Februari 2024, proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan beberapa catatan teknis dan lapangan. Sebagai wilayah pusat perkotaan dan pemerintahan, Kecamatan Pasaman dihadapkan pada tingginya mobilitas penduduk. Fenomena ini memicu tingginya pengurusan pemilih pindah memilih Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) serta pendaftaran pemilih yang menggunakan KTP-elektronik pada jam-jam kritis pemungutan suara (DPK).

Di samping permasalahan data pemilih, implementasi teknologi informasi melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) juga memberikan tantangan tersendiri. Kendala stabilitas jaringan internet dan proses sinkronisasi data dari TPS ke server pusat sempat berdampak pada dinamika jadwal Rapat Pleno

UIN IMAM BONJOL PADANG

Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat PPK Pasaman. Kendati demikian, proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu berhasil diselesaikan dan disahkan sebelum digeser ke pleno tingkat KPU Kabupaten Pasaman Barat.

3.3.3 Implikasi Hasil Pemilu terhadap Peta Politik Daerah

Hasil rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Pasaman memberikan dampak langsung terhadap konstelasi politik di Kabupaten Pasaman Barat. Perolehan suara di Dapil Pasaman Barat tidak hanya menentukan komposisi keterwakilan partai-partai politik di lembaga legislatif daerah, tetapi juga menjadi indikator awal dalam memetakan kekuatan politik menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu 2024 di Kecamatan Pasaman dapat disimpulkan sebagai miniatur proses demokrasi yang mencerminkan interaksi antara kesiapan teknis penyelenggara, efektivitas pengawasan, serta tingkat partisipasi politik masyarakat di wilayah pusat pemerintahan(BPS Pasaman Barat).

UIN IMAM BONJOL
PADANG